

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan dalam kurikulum dengan rentang waktu yang cukup pendek. Perubahan itu harus dilakukan karena melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan kurikulum seperti aspek filosofis, psikologis, sosiologis dan lingkungan. Perubahan kurikulum ini memberikan dampak terhadap isi dari kurikulum itu sendiri yang berkaitan dengan standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Dampak yang sangat signifikan ketika kurikulum itu berubah yaitu terhadap standar isi, karena harus mengubah isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan pada saat ini.

Salah satu fakta kurikulum yang masih hangat diperbincangkan pada saat ini adalah perubahan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013. Perubahan pada kurikulum 2013 ini menitikberatkan pada empat standar yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan dan penilaian. Empat standar ini mengalami perubahan yang sangat berbeda dari kurikulum sebelumnya, perubahan itu terlihat dengan adanya mengganti istilah standar kompetensi menjadi kompetensi inti yang didalamnya terdapat kompetensi inti 1, 2, 3 dan 4 yang mencakup didalamnya tentang sikap religious dan sosial yang diaplikasikan kedalam penilaian afektif, kompetensi inti 2 berkaitan dengan pengetahuan atau yang bersifat kognitif dan kompetensi inti 4 berkaitan dengan keterampilan yang diaplikasikan dalam penilaian psikomotorik.¹

Perubahan kurikulum ini berdampak terhadap beberapa mata pelajaran yang telah diberlakukan oleh pemerintah, karena ada perubahan isi sehingga harus mengubah struktur kurikulum yang telah ada baik dari mulai silabus, SKL, buku ajar hingga terhadap jenis penilaian yang digunakan. Perubahan ini harus dilakukan

¹Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis Dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm. 36.

karena kurikulum yang ada sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada saat ini, sehingga kurikulum perlu dimanaj kembali agar menghasilkan out pendidikan yang berkualitas.

Pada kenyataannya perubahan kurikulum ini memberikan permasalahan baru bagi guru, karena guru dituntut harus mampu membuat dan melengkapi administrasi pembelajaran dari mulai RPP, soal dan penilaian, sehingga guru disibukan dengan administrasi bukan fokus pada pembelajarannya karena tujuan dari perubahan kurikulum itu sendiri untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dengan pendekatan saintific. Dan baru-baru ini muncul lagi kebijakan bahwa RPP itu tidak harus banyak dan tebal tetapi cukup dengan satu lembar saja yang memuat intinya saja. Namun, belum juga berjalan perubahan itu sudah muncul masalah baru karena adanya *covid 19* yang memaksa mengubah sistem pembelajaran yang tadinya tatap muka menjadi belajar di rumah yang dilakukan dalam jaringan (daring).

Pembelajaran dengan sistem daring itu sendiri membuat perubahan kembali dalam kurikulum yakni dengan membuat kebijakan agar setiap sekolah menyusun kurikulum darurat yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan kondisi dan situasi kebutuhan sekolah dan tidak mesti menyamPendidikan Agama Islamkan semua materi terhadap siswa melainkan hanya beberapa saja yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh siswa. Kurikulum darurat ini pun belum sepenuhnya dipahami oleh setiap sekolah dan guru karena perubahan yang sebelumnya juga belum terlaksana dengan sempurna.

Kurikulum darurat dalam pelaksanaannya belum terukur efektivitannya sudah muncul lagi kurikulum yang baru yaitu kurikulum prototype. Kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Perubahan kurikulum merupakan salah satu cara dalam mengelola kurikulum supaya mampu memberikan perencanaan dalam pendidikan agar pendidikan ini lebih terarah dan menghasilkan produk yang benar-benar

berkualitas. Seharusnya perubahan ini memberikan efek kepada pendidikan menjadi lebih maju dan berkembang karena kurikulum yang dibuat sudah benar-benar dikelola oleh pemerintah atau yang sering disebut dengan istilah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Karena pada prinsipnya manajemen kurikulum itu sendiri ada yang meliputi beberapa aspek yaitu produktivitas, demokrasi, kooperatif, efektivitas dan efisien serta mengarahkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.²

Perubahan kurikulum dipandang perlu karena pengelola pendidikan harus menganalisis kembali tentang isi kurikulum itu sendiri apakah masih sesuai atau tidak dengan kebutuhan para pembelajar pada saat ini. Dalam hal ini yang lebih berhak dalam mengadakan perubahan kurikulum adalah pemerintah melalui menteri pendidikan, karena merekalah yang harus merencanakan, menyusun, mengelola, menerapkan dan mengevaluasi terhadap kurikulum. Kalau pemerintah membiarkan begitu saja bisa jadi kurikulum yang telah dibuat dengan baik tidak akan tepat pada sasaran, apa lagi negara kita merupakan negara yang cukup luas yang dalam penerapannya memerlukan waktu yang cukup lama. Dan lokasi yang terlalu jauh merupakan salah satu masalah dalam menerapkan kurikulum baru.

Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap pengelolaan kurikulum PAI yang selama ini mengikuti terhadap perubahan mata pelajaran yang lain. PAI itu sendiri dikelola langsung oleh kemenag dan dipecah menjadi beberapa mata pelajaran diantaranya: Quran hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fiqih. Selain itu, Kementerian Agama juga mengelola perubahan kurikulum mata Pelajaran Bahasa Arab. Perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka memberikan dampak yang lumayan besar dan harus diadakannya perubahan yang menyeluruh yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia.

² Noerlitasari, Retno Triwoelandari, and Muhammad Fahri, 'Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran SD Solihuddin School Thailand', *Attadib Journal Of Elementary Education*, 2.1 (2018).

Setiap kali perubahan kurikulum pasti memunculkan masalah baru, dan hal itu apakah muncul dari para perencana yang terkesan terburu-buru atau justru datang dari para pelaksana yang belum memahami terhadap manajemen kurikulum itu sendiri. Seharusnya muncul kebijakan baru tentang kurikulum itu mampu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Sebagaimana yang kutip dari Rusdiana bahwa model manajemen kurikulum itu ada beberapa model diantaranya adalah Model Manajemen Kurikulum Beauchamp, Model Manajemen Kurikulum Ralph W. Tyler, Model Manajemen Kurikulum Olivia. Ketiga model ini merupakan bentuk manajemen kurikulum yang dapat dilakukan dalam mengelola kurikulum.³

Tujuan dari manajemen kurikulum itu sendiri menciptakan proses pembelajaran yang efektif agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan baik tujuan filosofis, kurikuler, institusional, maupun intruksional dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum adalah untuk mengelola perencanaan kurikulum, kemudian mengelola implementasi kurikulum serta mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum yang selanjutnya mengelola perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan kenaikan kelas atau kelulusan, setelah itu mengelola pembangunan bahan ajar, media dan sumber belajar, tidak lupa juga mengelola pembangunan ekstrakurikuler dan kokurikuler dan ditahap akhir mengelola penerapan ujicoba atau merintis pembelajaran sebagaimana yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Manajemen kurikulum harus mampu mengelola semua kebutuhan dalam pendidikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Karena sehebat apapun perencanaan kalau tidak dilaksanakan tetap saja tidak mempunyai nilai, atau pelaksanaan jika tidak diawasi tidak dapat diukur tepat dan tidaknya perencanaan dengan pelaksanaan, begitupun pengawasan perlu ditindak lanjut dengan penilaian sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan sebuah rencana yang sudah digagas.

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan manajemen kurikulum terhadap PAI berhubung penulis merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Islam yang

³A Rusdiana and E Ratnawulan, *Manajemen Kurikulum: Konsep Prinsip Dan Aplikasinya Di Sekolah/Madrasah*, 3rd ed. (Bandung: Arsad Press, 2022), hlm. 31-33.

berkonsentrasi di Manajemen Pendidikan Islam. Penulis tidak akan membahas isi dari kurikulum PAI melainkan hanya akan membahas tentang manajemen kurikulumnya saja, karena dengan adanya perubahan kurikulum maka banyak mata pelajaran yang ikut berubah didalamnya salah satunya adalah PAI.

Menurut Ashan, yang dikutip oleh E. Mulyasa, menyatakan: Tiga aspek perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, yakni penentuan kompetensi yang menjadi tujuan, pengembangan strategi dalam langkah mencapai kompetensi, dan evaluasi sebagai Langkah penilaian. Adapun kompetensi yang menjadi tujuan adalah pernyataan yang ingin didapatkan siswa, yang memberikan gambaran hasil belajar pada semua aspek dari mulai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Begitupun strategi untuk mencapai kompetensi harus diupayakan bisa membantu siswa menguasai kompetensi yang ditetapkan sebelumnya, dalam hal membaca, menulis, mendengarkan, menciptakan, dan mengamati, hingga kompetensi terbentuk. Sedangkan evaluasi adalah aktivitas penilaian terhadap kemampuan akhir kompetensi untuk setiap siswa.⁴

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran wajib yang harus diajarkan kepada peserta didik dari mulai SD samPAI SMA bahkan diperguruan tinggi pun menjadi salah satu mata kuliah umum yang harus dipelajari. Karena PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting, maka diperlukan adanya pembaruan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian yang terencana. Dengan demikian, nilai-nilai PAI dapat tersampaikan kepada peserta didik secara efektif dan tetap berpedoman pada Kompetensi Inti serta Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan pemerintah.

Sejak diberlakukannya peraturan pada tahun 2007 melalui Pasal 4 ayat (1) dan (2), telah ditetapkan dengan jelas bahwa kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama dibebankan kepada setiap institusi pendidikan. Pendidikan ini hendaknya diselenggarakan, minimal dalam bentuk mata pelajaran, yang secara khusus bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan peserta didik

⁴ Mahmudi Mahmudi, '*Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, Dan Materi*', *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2019), hlm. 9.

dalam memahami, menginternalisasi, dan mempraktikkan ajaran agama. Tujuan ini dimaksudkan agar penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat berjalan selaras dengan kedalaman penghayatan nilai-nilai spiritual. PAI sendiri memegang peranan penting melalui berbagai fungsinya, termasuk dalam hal peningkatan kualitas diri, pembentukan karakter yang beretika, penyesuaian emosional, revitalisasi mental, tindakan preventif, penyampaian materi edukatif, serta fasilitasi ekspresi bakat. Karenanya, relevansi PAI tidak hanya terbatas pada penguasaan teoritis, melainkan juga pada aktualisasinya dalam praktik. Materi yang diajarkan dalam mata pelajaran PAI secara inheren memuat inti dari ajaran Islam, yakni Iman yang terdiri dari enam rukun, Islam yang memiliki lima rukun, serta Ihsan, yang ketiganya merupakan elemen integral yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan iman dan Islam.⁵

Dari beberapa penjelasan di atas, PAI tidak hanya cukup diajarkan dengan teori saja, melainkan harus dikuatkan dengan menerapkan nilai-nilai keislaman yang bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Karena pada saat ini masih terdapat beberapa peristiwa yang menjadikan masalah terhadap kerukunan dalam hidup baik itu sesama agama maupun berbeda agama. Adapun peristiwa yang sering ditemukan adanya bullying, diskriminasi, dan intoleransi yang harus diselesaikan agar anak bangsa tumbuh bersama dalam perbedaan tanpa ada permusuhan. Penulis beranggapan bahwa hal itu dapat diterapkan langsung dilembaga pendidikan dengan mengutamakan nilai-nilai keislaman yang sudah dipelajari dalam PAI.

Sesuai mandat PP No. 55 tahun 2007, Kementerian Agama bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah dan menetapkan regulasi di tingkat kementerian. Ditjen Pendidikan Islam memimpin inisiatif perancangan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum bagi upaya pembinaan. Melalui forum diskusi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, lahirlah Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Di samping itu, Direktorat PAI juga menginisiasi penerbitan Pedoman

⁵Ayatullah, 'Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Madrasah Aliyah Palapa Nusantara', *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2.2 (2020), hlm. 206.

pengembangan Standar Nasional PAI di lingkungan sekolah diatur melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 Tahun 2011. Ketetapan hukum ini memiliki fungsi krusial sebagai fondasi acuan dalam proses penyusunan, pelaksanaan program, serta evaluasi mutu pendidikan Islam yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umum.

Dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 55 Tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan, sekaligus untuk memantapkan posisi PAI di sekolah, Direktorat PAI (Ditpendis) menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 16 Tahun 2010 perihal Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Publikasi Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596). Peraturan Menteri Agama ini bertindak sebagai acuan umum dan merealisasikan inti sari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Poin-poin esensial yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama ini mencakup:

- a. Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
- b. Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- c. Pemberian pendidikan agama kepada peserta didik menjadi kewajiban apabila di dalam satu kelas terdapat setidaknya 15 siswa dengan keyakinan agama yang serupa. Apabila kuota 15 orang tersebut tidak terpenuhi dalam satu kelas, maka dimungkinkan penggabungan siswa seagama dari sekolah berbeda hingga jumlah minimum tersebut tercapai, sehingga pembelajaran agama dapat dilaksanakan. Dalam kondisi kurang dari 15 orang, penyusunan jadwal pembelajaran agama yang tidak merugikan siswa dapat dilakukan secara independen. Kerjasama antar institusi pendidikan juga menjadi opsi untuk penyelenggaraan pembelajaran agama bagi kelas dengan jumlah siswa kurang dari 15.
- d. Standar isi pendidikan agama pada sekolah dirumuskan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan masukan dari BSNP. Standar isi pendidikan agama pada sekolah adalah untuk memperdalam dan

memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik, serta untuk mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu standar isi PAI juga untuk menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi peserta didik. Lebih jauh, pendidikan agama di sekolah dimaksudkan untuk membangun sikap mental peserta didik agar berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, bertanggungjawab, dan mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

- e. Dalam hal kurikulum pendidikan agama disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan potensi sumber daya lingkungan sekolah dan daerah. Sekolah dapat juga menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan, pendalaman materi, dan penambahan jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- f. Dalam hal proses pembelajaran, pendidikan agama perlu mengedepankan keteladanan, pembiasaan akhlak mulia, dan pengamalan ajaran agama, dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama. Proses pembelajaran ini dilakukan melalui intra kurikuler dan ekstra kurikuler.
- g. Peraturan Menteri Agama ini mengatur standar kompetensi lulusan peserta didik. Secara teknis kompetensi lulusan peserta didik dalam bidang agama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- h. Pengadaan guru agama di lingkungan sekolah diatur oleh Peraturan Menteri Agama ini. Khusus untuk sekolah yang didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, tanggung jawab pengadaan guru agama berada pada instansi pemerintah atau pemerintah daerah tersebut.⁶

Kurikulum PAI perlu untuk dikembangkan karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat terlaksananya pembelajaran PAI dengan baik. Adapun

⁶ Imam Tolhah & dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2016), hlm. 4.

faktor yang pertama adalah faktor internal; PAI belum tercapai sepenuhnya yakni setiap manusia harus mencapai derajat iman dan takwa kepada Allah swt dan berkhlak mulia. Selain itu, pembelajaran PAI baru sebatas pengetahuan yang bersifat teoritis bukan dijadikan sebagai jalan hidup sehingga nilai-nilai agama belum tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang mampu mengubah pola hidup yang tadinya saleh individual menjadi saleh sosial.

Keterbatasan alokasi waktu pembelajaran PAI menjadi salah satu persoalan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum berbasis moderasi beragama. Luasnya cakupan materi PAI yang harus disampaikan berhadapan dengan keterbatasan waktu pembelajaran, sehingga guru menghadapi tuntutan untuk menyelesaikan capaian pembelajaran sekaligus melakukan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Padahal, moderasi beragama tidak cukup disampaikan melalui transfer pengetahuan, tetapi memerlukan proses dialog, pembiasaan, keteladanan, refleksi, dan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pembelajaran lebih berorientasi pada penyelesaian materi daripada pendalaman dan internalisasi nilai. Oleh karena itu, diperlukan manajemen kurikulum yang mampu mengoptimalkan alokasi waktu melalui integrasi nilai moderasi beragama ke dalam materi PAI, kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, serta budaya madrasah, sehingga keterbatasan waktu tidak menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembentukan peserta didik yang moderat.

Selanjutnya, Kesenjangan antara teori dan realitas sosial menjadi persoalan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. Secara teoritis dan normatif, PAI diarahkan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan agama belum selalu berbanding lurus dengan terbentuknya sikap toleran, adil, seimbang, anti-kekerasan, dan mampu menghargai perbedaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan melalui kurikulum dengan praktik keberagamaan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum PAI melalui perspektif moderasi beragama agar nilai-nilai keislaman tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi dapat

diinternalisasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan peserta didik. Upaya tersebut membutuhkan manajemen kurikulum yang sistematis melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga terdapat kesinambungan antara tujuan normatif PAI dengan kebutuhan dan realitas sosial peserta didik.

Permasalahan lain dalam implementasi kurikulum PAI adalah belum optimalnya pengukuran hasil pembelajaran secara komprehensif. Pengukuran hasil PAI masih cenderung menitikberatkan pada aspek penguasaan pengetahuan keagamaan, sementara aspek sikap dan perilaku sebagai manifestasi internalisasi nilai belum sepenuhnya terukur secara optimal. Kondisi tersebut menjadi semakin penting dalam penerapan PAI berbasis moderasi beragama, karena nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, komitmen kebangsaan, dan anti-kekerasan tidak cukup diukur melalui tes pengetahuan. Peserta didik yang mampu menjelaskan konsep moderasi belum tentu mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi kurikulum PAI yang mampu mengukur ketercapaian peserta didik secara utuh pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui berbagai teknik penilaian yang autentik, objektif, dan berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan manajemen kurikulum PAI berbasis moderasi beragama.

Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal; ada sebuah pemahaman transnasional yang menguat dan berpotensi menggeser terhadap cara pemahaman beragama di Indonesia yang sudah terkenal dengan khasnya yang moderat. Maka PAI harus diajarkan dengan berbasis kepada sebuah kebiasaan, kebudayaan dan pemberdayaan untuk membentuk peradaban yang mulai hilang. Selanjutnya adalah mengenai lingkungan hidup diantaranya tentang kemajuan dibidang teknologi, informasi dan kebangkitan industry serta akses Pendidikan yang bersifat global.

Ada alasan lain yang dianggap kurikulum PAI itu harus dikembangkan, yakni adanya beberapa kasus yang berkaitan dengan radikalisme dan intoleransi dikalangan remaja. Penulis menemukan informasi sebagai berikut : ada beberapa remaja di Garut yang ikut tergabung dengan salah organisasi yang dianggap oleh pemerintah membahayakan terhadap keutuhan bangsa. Berdasarkan informasi dari

Kompas.tv yang diberitakan pada tanggal 09 oktober 2021 yakni: “Dugaan puluhan anak terpapar ajaran radikal atau menyimpang terungkap setelah orang tua melaporkan perilaku aneh anaknya kepada aparat pemerintah setempat. Polres Garut Jawa Barat masih menyelidiki adanya lima puluh sembilan remaja di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota, Garut yang diduga dibaiat masuk organisasi Negara Islam Indonesia atau (NII). Polisi masih mendalami kasus ini dengan melibatkan berbagai pihak baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik atau Kesbangpol Garut, hingga Kodim setempat. Di luar penyelidikan oleh polisi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kabupaten Garut menyatakan akan membina ke-59 remaja yang diduga telah dibaiat paham NII. Puluhan remaja yang terlibat, kini telah dikembalikan kepada orang tuanya. Mereka disebut telah memegang teguh kembali NKRI ditandai dengan perjanjian yang disaksikan orang tua dan MUI.”⁷

Dari informasi diatas, bahwa Garut merupakan salah satu wilayah yang menjadi target dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk memahamkan kepada mereka tentang radikalisme supaya menantang terhadap kebijakan pemerintah dan ingin mendirikan negara islam Indonesia. Fenomena ini merupakan salah satu bukti bahwa remaja dan pelajar perlu adanya sebuah pemahaman agama yang *inklusif* dan menyeluruh, bukan hanya paham secara teoritis tetapi juga paham dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan pemahaman tentang agama terhadap remaja dan pelajar yaitu melalui pendidikan yang terbuka dan diajarkan di sekolah secara moderat dengan tidak meyalahkan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan peraturan yang sudah dibahas dan adanya kasus di atas, bahwa PAI dipandang perlu ada sentuhan baru agar tidak terkesan doktrin semata dan eksklusif dalam pengajarannya melainkan harus lebih terbuka dan mampu memberikan nilai-nilai *ukhuwah* yang bisa memberikan dampak positive terhadap kehidupan berbangsa dan benegara sesuai yang tercantum dalam point d, e, dan f.

⁷ Kompas, "59 Remaja di Garut Dibaiat Masuk NII, Mengapa Remaja Jadi Target Radikalisme?," *Kompas.tv*, 09 Oktober 2021. (Diakses 12 September 2023).

Maka dari itu, penulis menganggap perlu adanya sentuhan baru dari Pendidikan Agama Islam yaitu dengan membawa nilai-nilai moderasi beragama. Yakni memasukan pemahaman tentang moderasi beragama kedalam mata pelajaran PAI yang bisa mewujudkan nilai saleh individual menjadi saleh sosial.

Selain itu ada beberapa permasalahan lainnya yang ditemukan dalam pembelajaran PAI, permasalahan yang saat ini muncul adalah adanya kecenderungan kurikulum PAI yang masih bersifat tekstual-normatif dan kurang merespons isu-isu keberagaman. Jadi penyajian materi cenderung tekstual dan kurang kontekstual, sehingga menurunkan minat belajar serta efektivitas internalisasi nilai pada peserta didik.

Permasalahan selanjutnya adalah harus ada sebuah manajemen kurikulum yang jelas yang nantinya diperlukan untuk menjamin nilai moderasi (*wasathiyah*) terintegrasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini perlu ada sebuah desain yang bisa memberikan suasana baru dalam mengajarkan PAI di sekolah atau madrasah. Karena kalau kita lihat, kegiatan yang ada di sekolah atau madrasah maka tidak terlepas dari yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah/madrasah. Penulis beranggapan dari beberapa unsur tersebut bisa mengambil salah satunya, apakah disisipkan kedalam intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler maupun kedalam budaya sekolah/madrasah. Dan hal yang paling memungkinkan adalah mengaitkannya kedalam program ekstrakurikuler.

Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba merancang sebuah manajemen kurikulum yang difokuskan pada mata pelajaran PAI yang dikuatkan dengan nilai-nilai moderasi beragama yang pada saat ini sedang ramai diperbincangkan di lingkungan pendidikan khususnya lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam. Nilai-nilai yang dimasukan ke dalam PAI yakni yang telah disampaikan oleh Kemenag dengan beberapa prinsip tentang moderasi beragama.

Penulis mempunyai anggapan bahwa pembelajaran PAI perlu ada sebuah pembaruan, karena sudah mengalami beberapa perubahan baik dari kebutuhan zaman maupun dari segi materinya. Banyak siswa yang mempelajari PAI namun

tidak bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka hanya hapal secara teoritis tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, sehingga banyak penyimpangan-pentimpangan yang dilakukan oleh para siswa. Selain itu, metode yang kurang variative, materi yang tidak relevan dan cenderung dipaksakan tanpa melihat unsur yang dibutuhkan dalam keadaan.

Ada faktor lain yang perlu dibenahi diantaranya, perbedaan pemahaman agama di kalangan siswa. Siswa berasal dari latar belakang keluarga dan komunitas yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terhadap ajaran Islam bisa bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau perdebatan di antara siswa jika tidak dikelola dengan baik oleh pendidik. Berikutnya mengenai Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Islami, Sulitnya mengintegrasikan nilai-nilai islami ke dalam perilaku sehari-hari siswa, terutama di lingkungan sekolah atau masyarakat yang pluralistik. Ada juga pengaruh lingkungan eksternal, Media sosial dan budaya populer sering kali memberikan pengaruh negatif terhadap pemahaman agama siswa, menjauhkan mereka dari nilai-nilai islami. Perlu juga adanya evaluasi yang efektif karena sistem evaluasi sering kali lebih fokus pada aspek kognitif daripada aspek afektif (nilai dan sikap), sehingga tidak mencerminkan perkembangan karakter siswa secara utuh.

Selain itu, ada beberapa faktor yang dipandang perlu adanya sebuah pembenahan dalam kurikulum PAI, karena tantangan di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan memberikan masalah baru dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah tantangan nasional dan global yang mana isu-isu tentang diskriminasi dan intoleransi menjadi hal yang menakutkan dan sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dapat dipahami bahwa sikap Intoleransi sangat berdampak negatif bagi seluruh keberadaan masyarakat serta mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan karena intoleran dapat menimbulkan perpecahan, mengancam HAM serta merusak moral anak-anak remaja yang menjadi penerus bangsa Indonesia di masa depan. Apalagi negara kita sedang menuju ke generasi emas yakni menuju tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara lain tanpa adanya sebuah permasalahan.

Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk merevisi pendekatan dalam penyelenggaraan PAI, salah satu strategi implementatif terkini adalah

dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi beragama ke dalam kurikulumnya. Prinsip moderasi beragama ini telah diadopsi menjadi kebijakan resmi pemerintah guna menumbuhkan lingkungan kehidupan beragama yang harmonis serta mencegah terjadinya konflik antarumat beragama. Melalui pengintegrasian moderasi beragama, PAI dapat diselaraskan dengan nilai-nilai moderasi beragama.

Lebih lanjut, moderasi diakui sebagai kebijakan pemerintah melalui mandat penguatan Moderasi Beragama (MB) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Kementerian Agama, namun implementasi di level manajerial kurikulum masih bersifat sporadis (belum sistematis). Dan ini dipandang sangat perlu untuk dibuatkan sebuah manajerial kurikulum yang jelas, supaya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh pemerintah.

Selanjutnya adalah tentang kesenjangan (*Research Gap*): Banyak guru PAI memahami moderasi secara teoretis, tetapi manajemen lembaganya (perencanaan program, alokasi sumber daya, dan sistem evaluasi) belum mendukung terciptanya ekosistem moderat secara holistik. Maka inipun perlu disikapi dengan serius, supaya pemahaman terhadap moderasi beragama bukan hanya sebatas pemahaman teoritis tetapi lebih kepada pengimplementasian. Dan jika moderasi beragama ini tidak dikelola secara manajerial, maka nilai moderasi hanya akan menjadi sebuah slogan tanpa perubahan perilaku pada peserta didik.

Prinsip dalam moderasi beragama itu ada dua yakni adil dan berimbang. Prinsip ini dikembangkan dengan beberapa indikator diantaranya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal sebagai mana yang tercantum dalam buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kemenag Republik Indonesia pada tahun 2019.

Dalam buku itu memiliki tiga bagian, Bagian pertama ini menguraikan penjabaran konseptual mengenai moderasi beragama, yang mencakup definisinya, nilai dan prinsip dasarnya, sumber inspirasinya dari tradisi berbagai agama, serta indikator-indikatornya. Di dalamnya, diskusi mengenai prinsip keadilan, keseimbangan, akomodasi, keterbukaan, dan toleransi akan menjadi komponen

vital sebagai tolok ukur moderasi. Bagian kedua menjelaskan latar belakang dan konteks sosio-kultural yang mendasari urgensi moderasi beragama, serta contoh penerapan praktisnya dalam pengalaman empiris masyarakat Indonesia. Moderasi dipandang sebagai sebuah lensa (perspektif) dalam setiap praktik kehidupan beragama. Bagian ketiga menguraikan langkah-langkah yang perlu diikuti dalam upaya penguatan dan pelebagaan moderasi beragama. Maksud dari penguatan ini adalah agar moderasi beragama dapat secara sistematis diinstitusionalisasikan sebagai program nasional, sehingga menjadi pandangan yang mendarah daging bagi setiap pribadi maupun badan usaha.⁸

Berhubung moderasi beragama berkaitan dengan agama maka yang lebih tepat untuk memberikan edukasi adalah mata pelajaran agama yang lebih khususnya untuk umat muslim yaitu PAI. Dalam PAI terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan seperti Aqidah, Akhlak, Fiqih, Al-Quran dan Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam dan lain sebagainya. Konsep moderasi beragama bisa saja diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran baik yang tergolong kedalam *Intrucisional Effect* atau *Nurturant Effect* yang selanjutnya ada tindak lanjut untuk dijadikan penilaian.

Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan KMA 183 dan 184 yang menetapkan penyesuaian struktur kurikulum PAI agar relevan dengan tuntutan peserta didik kontemporer. Meskipun demikian, implementasi penuh kurikulum ini masih terhambat oleh berbagai persoalan yang berkaitan dengan sistem administrasi pendidikan maupun pemahaman materi.

Moderasi beragama dapat diterapkan dengan maksimal jika semua unsur ikut terlibat dan berperan dalam melaksanakan program tersebut, salah satu tempat yang tepat untuk dijadikan sarana memahami moderasi beragama adalah Lembaga Pendidikan, karena dalam Lembaga Pendidikan terjadi suatu transfer ilmu pengetahuan dan adanya pembiasaan yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan.

⁸ R Ahmad, *Penguatan Moderasi Beragama*, in *Dalam Opini Harian Kompas*, Senin, no. 2 (Jakarta: RI, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm. III.

Dan konsep tersebut dapat dilakukan dari mulai Pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Moderasi beragama juga akan mudah dipahami oleh masyarakat jika dikaitkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat formal maupun yang nonformal. Terlebih jika pemerintah menginginkan moderasi beragama ingin dipahami dan diterapkan di Lembaga Pendidikan, maka pemerintah harus membuat suatu kurikulum Pendidikan yang ada kaitannya dengan moderasi beragama dalam setiap mata pelajaran. Dengan demikian akan mudah diterapkan dan dipahami karena semua mata pelajaran mengaitkan moderasi beragama dalam setiap materi.

Meskipun moderasi beragama telah menjadi bagian penting dalam kebijakan kehidupan beragama di Indonesia, implementasinya dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam belum tentu terintegrasi secara sistematis dan komprehensif. Integrasi nilai moderasi masih berpotensi berlangsung secara parsial, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi kurikulum. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nilai-nilai moderasi beragama belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari pengalaman belajar dan budaya madrasah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen kurikulum PAI yang secara sistematis menjadikan moderasi beragama sebagai basis dalam seluruh proses pengelolaan kurikulum.

Setidaknya ada beberapa alasan untuk merancang kurikulum PAI. *Pertama*, Tantangan keberagaman, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa. PAI perlu mengajarkan nilai-nilai agama dengan pendekatan yang inklusif, toleran, dan saling menghormati antar umat beragama. Oleh karena itu, manajemen kurikulum PAI harus mampu menciptakan suasana yang mendukung dalam terlaksananya moderasi beragama yang sudah menjadi aturan dari pemerintah, yaitu kemampuan untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh toleransi dan menghargai perbedaan tanpa ada unsur-unsur yang merugikan terhadap pihak lain. *Kedua*, Radikalisasi dan Intoleransi, Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kekhawatiran terhadap radikalisasi dan intoleransi di kalangan segelintir masyarakat, terutama di kalangan generasi

muda. PAI sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter harus mampu menanggulangi potensi ekstremisme dengan mengedepankan prinsip moderasi beragama, yang menekankan pada pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Karena dengan ditingkatkan rasa saling menghargai terhadap orang lain, maka akan tercipta kehidupan yang rukun.

Ketiga, Perubahan Sosial dan Globalisasi, Dalam era globalisasi ini, interaksi antar budaya dan agama semakin luas. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, manajemen kurikulum PAI perlu disesuaikan dengan perubahan sosial ini agar PAI dapat relevan dan aplikatif bagi siswa sesuai dengan kebutuhannya, serta mendukung terciptanya harmoni sosial. Perubahan ini tidak bisa kita bendung karena kecanggihan zaman yang telah menuntut manusia harus berpikir lebih ekstra agar generasi yang bisa beradaptasi dengan baik.

Keempat, Relevansi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan Nilai Moderasi Beragama, Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi sejauh mana kurikulum PAI yang ada saat ini sudah mendukung konsep moderasi beragama, baik dalam segi materi ajar, metode pembelajaran, maupun penilaian. Kurikulum yang berbasis moderasi beragama tidak hanya memberikan pemahaman agama secara normatif, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi, kesetaraan, dan perdamaian. Dengan demikian pelaksanaan PAI dan penerapan moderasi beragama akan terlaksana dan saling melengkapi.

Kelima, manajemen kurikulum memiliki peran vital dalam implementasi moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi manajemen kurikulum, dari fase perencanaan hingga evaluasi, dalam mendukung pembelajaran yang moderat dan inklusif, serta pengaruh positifnya terhadap pengembangan karakter peserta didik. Pada intinya, penelitian ini menekankan pentingnya siswa memiliki kecerdasan tidak hanya dalam ranah pengetahuan (*kognitif*), melainkan juga dalam ranah sikap (*afektif*), yaitu kemampuan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam konteks kehidupan nyata.

Cara yang dianggap tepat dalam penyampaian materi PAI yaitu dengan mengelola kurikulum yang disusun secara rapi yang nantinya akan dibungkus

dengan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi penulis mencoba merancang sebuah manajemen kurikulum yang terfokus pada PAI yang memunculkan nilai-nilai moderasi beragama.

Dalam pelaksanaannya masih banyak madrasah yang kurang respon terhadap adanya moderasi beragama padahal hal itu sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri (PMA) Nomor 3 Tahun 2024. Isi dari Perpres tersebut adalah tentang Penguatan Moderasi Beragama ditetapkan pada 25 September 2023. Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia.

Pendekatan moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang, sikap, serta praktik religius yang mencerminkan inti ajaran agama dan keyakinan yang menjaga kehormatan manusia. Implementasi penguatan moderasi beragama mengacu pada panduan umum yang mencakup:

1. Alat ukur Moderasi Beragama,
2. Inti Moderasi Beragama,
3. Lingkungan dan Komunitas Penting Moderasi Beragama,
4. Arah Kebijakan dan strategi Memperkuat Moderasi Beragama,
5. Rencana Penguatan Moderasi Beragama.

Isi Peraturan Presiden ini mencakup pedoman umum yang termaktub dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan. Penekanan peraturan ini adalah bahwa penguatan moderasi beragama harus dilaksanakan melalui tahapan yang terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait hal ini, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2024 mengatur secara spesifik mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan moderasi beragama. Peraturan ini dikeluarkan di Jakarta pada 13 Februari 2024 dan berlaku efektif per 15 Februari 2024 sejak tanggal diterbitkan.

Dengan demikian bahwa aturan tentang penerapan moderasi beragama sudah cukup kuat dan berpayung hukum jelas. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang dipahami, sehingga perlu adanya sebuah sistem dalam penguatan hal

tersebut di madrasah salah satunya adalah melalui Pendidikan dan dimasukan ke dalam kokurikuler di masing-masing madrasah.

Agar terwujudnya nilai-nilai PAI yang memuat nilai-nilai moderasi beragama, maka penulis beranggapan perlu adanya sebuah manajemen kurikulum yang sesuai dengan PAI. Kurikulum yang diharapkan adalah yang direncanakan secara matang, diproses secara teliti, diterapkan secara menyeluruh dan dievaluasi dengan sungguh-sungguh. Sehingga akan menghasilkan produk kurikulum yang benar-benar bermutu.

Pendekatan pembelajaran agama yang berorientasi kognitif turut menjadi faktor ketidakberhasilan pendidikan agama di sekolah. Perhatian terhadap aspek afektif dan psikomotorik siswa minim, yang berdampak pada rendahnya pembentukan sikap, perilaku berakhlak mulia, dan penghayatan keagamaan. Selain itu, selain kendala dalam kemahiran membaca dan menulis Al-Qur'an, kesungguhan siswa dalam menunaikan salat lima waktu juga menunjukkan angka yang rendah.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dipandang perlu untuk diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan manajemen kurikulum dan PAI yang dikuatkan dengan nilai-nilai moderasi beragama dengan judul : “Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka secara umum persoalan penelitian (*research problem*) ini adalah bagaimana Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut selanjutnya penulis tuangkan dalam pertanyaan ini dengan merumuskan masalah penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut?
2. Bagaimana pengorganisasian kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut?

3. Bagaimana implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut?
4. Bagaimana evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Perencanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut
2. Pengorganisasian kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut
3. Implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut
4. Evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama di Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis:

1) Secara Akademis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang moderasi beragama dan PAI yang mudah-mudahan menjadi hal baru dalam pendidikan, Jika sudah terdapat kajian serupa, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya serta menunjukkan kebaruan aspek manajerial pada konteks Kelompok Kerja Madrasah Aliyah VI Garut.

2) Secara Praktis

- a. Bagi para Kepala Madrasah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan moderasi beragama di lingkungan madrasah yang berada di bawah pengawasan langsung maupun tidak langsung.
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan wawasan kaitan antara PAI dengan moderasi beragama yang tercantum dalam kurikulum.

- c. Bagi penulis diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan mengenai manajemen yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum PAI dengan berbasis pada moderasi beragama.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi informasi awal dan bahan kajian untuk pengembangan penelitian lanjutan yang lebih kemprehenship dan mendalam.
- e. Dijadikan dasar untuk penerapan pemahaman agama dalam kehidupan agar dapat saling menghargai dan menghormati antara umat satu dengan yang lainnya di masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga menciptakan para pelajar yang moderat yang dapat menerima terhadap perbedaan dan terciptanya umat muslim yang *wasathan*.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembatasan objek penelitian diuraikan secara eksplisit melalui penetapan ruang lingkup studi. Ruang lingkup penelitian ini secara spesifik meliputi manajemen kurikulum dalam tahapan perencanaan, implementasi, pengawasan, serta evaluasi. Studi ini juga akan mendalami materi kurikulum PAI di jenjang pendidikan menengah, yang ditekankan pada integrasi nilai-nilai moderasi beragama. Peneliti memusatkan perhatian pada tata kelola kurikulum pendidikan, dengan mata pelajaran PAI sebagai studi kasus, mengingat posisinya sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Islam dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian merupakan konstruksi konseptual yang menggambarkan hubungan logis antara teori, konsep, permasalahan penelitian, dan arah pemecahan masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun berdasarkan asumsi bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kedudukan strategis dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku keberagamaan peserta didik. PAI tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan keislaman, tetapi juga pada pembentukan peserta didik yang memiliki akhlak mulia, mampu menjalankan ajaran agama secara baik, serta dapat hidup secara harmonis dalam masyarakat yang plural.

Kedudukan strategis PAI tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menempatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecakapan, kemandirian, demokrasi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari tujuan pendidikan.⁹ Oleh karena itu, kurikulum PAI perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan masyarakat, termasuk kebutuhan untuk membangun keberagaman yang moderat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, bahasa, tradisi, dan kelompok sosial menjadikan kemampuan hidup dalam keberagaman sebagai kebutuhan penting dalam pendidikan. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa, tetapi apabila tidak disertai dengan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan mengelola keberagaman secara proporsional, dapat menimbulkan konflik sosial dan keagamaan. Dalam konteks tersebut, pendidikan agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman keagamaan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu membangun sikap keberagaman yang damai, toleran, adil, dan seimbang.

Salah satu permasalahan penting dalam pengembangan kurikulum PAI adalah belum terintegrasinya nilai-nilai moderasi beragama secara sistematis ke dalam keseluruhan komponen kurikulum. Moderasi beragama pada dasarnya telah memperoleh perhatian penting dalam kebijakan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Namun, keberadaan kebijakan tersebut belum secara otomatis menjamin bahwa nilai-nilai moderasi telah menjadi bagian yang utuh dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum PAI. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara kebijakan moderasi beragama, dokumen kurikulum, implementasi pembelajaran, dan hasil yang diharapkan.

Kurikulum PAI pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai perangkat untuk menyampaikan pengetahuan keislaman, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.

tawassuṭ (mengambil jalan tengah), *tawāzun* (berimbang), *i'tidāl* (adil dan konsisten), *tasāmuḥ* (toleransi), *muwāṭanah* (komitmen kebangsaan), *qudwah* (keteladanan), musyawarah, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal seharusnya tidak hanya muncul sebagai materi tambahan, tetapi terintegrasi dalam tujuan, isi, proses, pengalaman belajar, serta evaluasi kurikulum. Kementerian Agama menempatkan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi dalam implementasi kurikulum PAI adalah keterbatasan alokasi waktu pembelajaran. PAI memiliki ruang lingkup materi yang cukup luas karena tidak hanya mencakup aspek pengetahuan keislaman, tetapi juga pembentukan sikap, akhlak, keterampilan keagamaan, serta internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, guru dituntut menyelesaikan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum dengan alokasi waktu yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara luasnya tujuan dan materi PAI dengan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

Permasalahan alokasi waktu menjadi semakin kompleks ketika PAI dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama tidak cukup diajarkan melalui penyampaian konsep secara teoritis, tetapi membutuhkan proses internalisasi, pembiasaan, keteladanan, dialog, diskusi, refleksi, dan pengalaman nyata. Proses tersebut membutuhkan waktu yang memadai agar peserta didik tidak hanya mengetahui konsep *tawassuṭ*, *tawāzun*, *i'tidāl*, dan *tasāmuḥ*, tetapi juga mampu memahami, menghayati, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Agama menempatkan moderasi beragama sebagai proses yang berkaitan dengan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, pencapaiannya membutuhkan proses pendidikan yang berkesinambungan.

Keterbatasan waktu juga dapat menyebabkan guru lebih memprioritaskan penyelesaian materi pembelajaran dibandingkan proses pendalaman nilai. Dalam

situasi waktu yang terbatas, pembelajaran PAI cenderung diarahkan pada metode yang dianggap efisien untuk menyampaikan materi, seperti ceramah, penugasan, dan latihan soal. Sementara itu, metode yang membutuhkan waktu lebih panjang, seperti diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, proyek sosial, refleksi, dan pembelajaran kolaboratif, belum tentu dapat dilaksanakan secara optimal. Padahal, metode-metode tersebut sangat relevan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami perbedaan dan menyelesaikan persoalan kehidupan secara moderat.

Keterbatasan waktu juga berpengaruh terhadap integrasi moderasi beragama ke dalam berbagai materi PAI. Misalnya, pada materi fikih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan sikap *tasāmuḥ* dan menghargai perbedaan. Pada materi Akidah Akhlak dapat dikembangkan nilai *i'tidāl*, *tawāzun*, dan akhlak sosial. Pada Al-Qur'an-Hadis dapat dikaji ayat dan hadis yang berkaitan dengan keadilan, toleransi, persaudaraan, dan larangan kekerasan. Sementara dalam Sejarah Kebudayaan Islam, peserta didik dapat mempelajari pengalaman historis umat Islam dalam membangun kehidupan bersama dalam masyarakat yang beragam. Namun, integrasi tersebut membutuhkan perencanaan waktu yang memungkinkan guru melakukan pendalaman dan refleksi.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan alokasi waktu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan persoalan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum harus mampu mengatur dan mengoptimalkan waktu yang tersedia agar tujuan PAI dan nilai moderasi beragama tetap dapat dicapai. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui pengintegrasian nilai moderasi ke dalam materi PAI yang sudah ada, sehingga tidak selalu membutuhkan penambahan mata pelajaran atau jam pelajaran baru.

Dengan demikian, strategi yang dapat dilakukan bukan semata-mata menambah jam pelajaran PAI, tetapi mengoptimalkan alokasi waktu melalui integrasi nilai moderasi beragama ke dalam pembelajaran yang telah berjalan. Selain itu, penguatan dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, budaya madrasah, pembiasaan, kegiatan sosial, dan keteladanan

guru. Dengan pendekatan tersebut, internalisasi moderasi beragama dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa membebani struktur kurikulum dengan tambahan materi yang berdiri sendiri.

Dalam perspektif manajemen kurikulum, keterbatasan waktu tersebut menuntut adanya perencanaan yang efektif, pengorganisasian program yang efisien, pelaksanaan pembelajaran yang kontekstual, dan evaluasi yang berkelanjutan. Perencanaan harus menentukan prioritas kompetensi dan nilai yang hendak dicapai; pengorganisasian harus mengatur pemanfaatan waktu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelaksanaan harus menggunakan strategi pembelajaran yang efektif; sedangkan evaluasi harus memastikan bahwa keterbatasan waktu tidak menyebabkan tujuan pembentukan sikap moderat terabaikan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa minimnya alokasi waktu pembelajaran PAI berpotensi menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kurikulum PAI berbasis moderasi beragama. Persoalan tersebut semakin penting dikaji karena keberhasilan moderasi beragama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan materi dalam kurikulum, tetapi juga oleh tersedianya waktu dan pengalaman belajar yang cukup untuk melakukan internalisasi nilai.

Selanjutnya, permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya penelitian Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama adalah adanya kesenjangan antara teori atau cita-cita normatif Pendidikan Agama Islam dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Secara konseptual, PAI memiliki tujuan yang sangat kuat dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktik kehidupan sosial, masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan nilai keagamaan yang dipelajari di lembaga pendidikan belum selalu berbanding lurus dengan sikap dan perilaku peserta didik dalam menghadapi perbedaan.

Secara normatif, pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan juga bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab.¹⁰ Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. PAI idealnya mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki pemahaman agama sekaligus mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghadapi tantangan berupa perbedaan pandangan keagamaan, intoleransi, polarisasi, ujaran kebencian, penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, serta kecenderungan memahami persoalan agama secara hitam-putih. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan Islam karena peserta didik merupakan bagian dari masyarakat dan sekaligus kelompok yang sangat mudah berinteraksi dengan berbagai informasi melalui media digital.

Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan antara pengetahuan keagamaan dengan praktik keberagamaan. Peserta didik dapat memahami konsep toleransi secara teoritis, tetapi belum tentu mampu menunjukkan sikap toleran ketika menghadapi perbedaan pendapat. Demikian pula, peserta didik dapat memahami konsep persaudaraan dalam Islam, tetapi dalam kehidupan sosial masih dapat terjadi sikap saling mengejek, memberikan label negatif, atau menolak kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PAI tidak cukup hanya dilihat dari penguasaan materi, tetapi harus dilihat dari sejauh mana nilai tersebut mengalami internalisasi dan diwujudkan dalam perilaku.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat gap antara *what should be* dan *what is*. *What should be* menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan oleh teori dan tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya peserta didik yang religius, berakhlak, toleran, adil, seimbang, dan mampu hidup dalam keberagaman. Sementara itu, *what is* menggambarkan realitas sosial yang masih menghadirkan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

berbagai bentuk intoleransi, eksklusivisme, konflik, dan ketidakmampuan sebagian individu dalam mengelola perbedaan.

Dalam konteks inilah konsep moderasi beragama menjadi penting. Kementerian Agama menjelaskan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.² Moderasi beragama juga memiliki empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.³ Keempat indikator tersebut memiliki relevansi langsung dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural.

Dengan demikian, moderasi beragama dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif PAI dengan kebutuhan kehidupan sosial. Nilai agama yang dipelajari peserta didik perlu diterjemahkan ke dalam kemampuan menghadapi realitas sosial. Misalnya, konsep *tawassuṭ* tidak berhenti pada pemahaman tentang jalan tengah, tetapi diwujudkan dalam kemampuan peserta didik menghindari sikap ekstrem. Konsep *tawāzun* diwujudkan melalui kemampuan menjaga keseimbangan dalam berpikir dan bertindak. *I'tidāl* diwujudkan melalui sikap adil. *Tasāmuh* diwujudkan melalui kemampuan menghormati perbedaan. Sementara *muwāṭanah* diwujudkan melalui komitmen terhadap kehidupan kebangsaan.

Persoalannya adalah bahwa nilai-nilai tersebut tidak akan secara otomatis berubah menjadi perilaku hanya karena telah diajarkan dalam pembelajaran PAI. Internalisasi nilai membutuhkan proses pendidikan yang terencana, terorganisasi, dilaksanakan secara konsisten, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, kesenjangan antara teori dan realitas sosial sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan terhadap penguatan manajemen kurikulum PAI.

Kurikulum PAI perlu dirancang agar mampu menghubungkan materi keagamaan dengan persoalan nyata yang dihadapi peserta didik. Pembelajaran tidak cukup berhenti pada pertanyaan “apa ajaran Islam tentang toleransi?”, tetapi perlu dikembangkan menjadi “bagaimana peserta didik menerapkan toleransi ketika menghadapi perbedaan pendapat di sekolah, masyarakat, dan media sosial?”. Demikian pula, pembelajaran tentang larangan kekerasan perlu dikaitkan dengan

kemampuan peserta didik menyelesaikan konflik secara damai dan tidak melakukan kekerasan verbal maupun fisik.

Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran PAI menjadi lebih kontekstual. Peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang agama (*religious knowledge*), tetapi juga memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam menghadapi persoalan kehidupan (*religious practice and social behavior*).

Kesenjangan teori dan realitas sosial juga menunjukkan pentingnya perubahan orientasi kurikulum PAI dari sekadar transfer pengetahuan menuju internalisasi dan aktualisasi nilai. Kurikulum perlu memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik berdiskusi, melakukan refleksi, memecahkan masalah, bekerja sama dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan melakukan kegiatan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi bagian dari pengalaman belajar, bukan sekadar konsep yang dihafalkan.

Dari perspektif manajemen kurikulum, kesenjangan tersebut harus dijawab melalui empat fungsi utama. Perencanaan harus mengidentifikasi kebutuhan sosial peserta didik dan memasukkan nilai moderasi ke dalam tujuan serta program kurikulum. Pengorganisasian harus memastikan adanya pembagian tugas dan koordinasi antara kepala madrasah, guru, wali kelas, dan unsur lainnya. Pelaksanaan harus menghadirkan pembelajaran yang dialogis, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Sementara evaluasi harus mengukur tidak hanya penguasaan pengetahuan, tetapi juga perkembangan sikap dan perilaku moderat peserta didik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kesenjangan teori dan realitas sosial merupakan salah satu alasan penting perlunya manajemen kurikulum PAI berbasis moderasi beragama. Manajemen kurikulum diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai ideal yang terdapat dalam ajaran Islam dan tujuan pendidikan benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, proses pembelajaran, budaya madrasah, dan perilaku peserta didik.

Permasalahan yang lain dalam pelaksanaan kurikulum PAI adalah pengukuran hasil pembelajaran yang belum sepenuhnya mampu menggambarkan keberhasilan peserta didik secara utuh. PAI pada hakikatnya tidak hanya bertujuan

menghasilkan peserta didik yang menguasai pengetahuan keislaman, tetapi juga membentuk sikap, akhlak, dan kemampuan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan PAI seharusnya tidak hanya dilihat dari pencapaian nilai akademik, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik.

Secara konseptual, hasil pendidikan mencakup perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.¹¹ Dalam pembelajaran PAI, ketiga aspek tersebut memiliki kedudukan yang penting. Aspek kognitif berkaitan dengan penguasaan pengetahuan agama, aspek afektif berkaitan dengan sikap dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama, sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan kemampuan mengamalkan pengetahuan dan nilai tersebut dalam tindakan nyata. Permasalahan muncul ketika pengukuran hasil PAI lebih banyak menekankan aspek kognitif melalui tes tertulis, sementara aspek sikap dan perilaku belum memperoleh perhatian yang seimbang.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika kurikulum PAI diarahkan untuk mengembangkan moderasi beragama. Nilai-nilai seperti *tawassuʿ*, *tawāzun*, *iʿtidāl*, *tasāmuḥ*, *muwāʿatanah*, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya tidak dapat diukur secara memadai hanya dengan pertanyaan pilihan ganda atau tes tertulis. Peserta didik mungkin mampu menjelaskan pengertian toleransi, tetapi kemampuan menjelaskan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa peserta didik benar-benar memiliki sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara mengetahui nilai moderasi dan mengamalkan nilai moderasi. Peserta didik dapat mengetahui bahwa Islam mengajarkan toleransi, tetapi ukuran keberhasilannya harus dapat dilihat dari bagaimana peserta didik bersikap ketika berhadapan dengan teman yang berbeda pendapat, berbeda latar belakang, atau berbeda praktik keagamaan. Demikian pula, pemahaman tentang anti-kekerasan belum cukup apabila belum tercermin dalam kemampuan peserta didik menyelesaikan konflik secara damai.

¹¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 22–23.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengukuran hasil PAI perlu dikembangkan secara lebih komprehensif. Penilaian tidak hanya diarahkan pada “apa yang diketahui peserta didik”, tetapi juga pada “apa yang diyakini, bagaimana sikapnya, dan bagaimana ia bertindak”. Dalam konteks moderasi beragama, pengukuran perlu mampu melihat sejauh mana nilai-nilai yang diajarkan telah mengalami proses internalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan peserta didik.

Kementerian Agama menempatkan moderasi beragama pada beberapa indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi. Keempat indikator tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam mengembangkan instrumen evaluasi PAI berbasis moderasi beragama. Misalnya, komitmen kebangsaan dapat dilihat melalui sikap menghargai Negara Kesatuan Republik Indonesia; toleransi dapat dilihat melalui kemampuan menghargai perbedaan; anti-kekerasan dapat dilihat melalui kemampuan menyelesaikan konflik secara damai; sedangkan penerimaan terhadap tradisi dapat dilihat melalui sikap menghargai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Permasalahan pengukuran juga berkaitan dengan validitas dan objektivitas penilaian sikap. Sikap peserta didik tidak selalu dapat diketahui melalui satu kali pengamatan atau satu jenis instrumen. Sikap moderat merupakan perilaku yang berkembang melalui proses dan konteks. Oleh karena itu, penilaiannya perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai teknik, seperti observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, jurnal, portofolio, proyek, refleksi, dan dokumentasi perilaku peserta didik. Pendekatan yang beragam dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan peserta didik.

Selain itu, terdapat persoalan kesenjangan antara hasil penilaian dengan kehidupan nyata peserta didik. Nilai rapor PAI yang tinggi belum selalu dapat digunakan sebagai indikator bahwa peserta didik telah memiliki keberagamaan yang moderat. Peserta didik dapat memperoleh nilai tinggi dalam aspek pengetahuan agama, tetapi dalam interaksi sosial masih menunjukkan sikap eksklusif, kurang menghargai perbedaan, atau mudah menerima informasi keagamaan tanpa melakukan verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil

evaluasi perlu dikaitkan dengan perilaku nyata peserta didik di lingkungan madrasah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, evaluasi PAI berbasis moderasi beragama perlu diarahkan pada penilaian autentik dan berkelanjutan. Penilaian autentik memungkinkan guru melihat kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan nilai yang dipelajari dalam situasi nyata. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak berhenti pada pencapaian skor, tetapi dapat dilihat dari kemampuan peserta didik mengaktualisasikan nilai agama dalam kehidupan.

Dari perspektif manajemen kurikulum, persoalan pengukuran hasil PAI merupakan bagian penting dari fungsi evaluasi. Evaluasi bukan hanya kegiatan memberikan nilai kepada peserta didik, tetapi merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan kurikulum telah tercapai dan apakah terdapat bagian yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pada perencanaan, pelaksanaan, metode pembelajaran, materi, maupun program kurikulum berikutnya.¹²

Dengan demikian, pengukuran hasil PAI yang belum optimal menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem evaluasi yang mampu mengukur keberhasilan peserta didik secara komprehensif, khususnya dalam aspek moderasi beragama. Evaluasi harus mampu menghubungkan antara pengetahuan agama, sikap keberagamaan, dan perilaku sosial peserta didik.

Salah satu pendekatan yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah moderasi beragama. Kementerian Agama mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.¹³ Dengan pengertian tersebut, moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau melemahkan ajaran agama, tetapi menjadi

¹² Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Edisi Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 3.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 17.

cara memahami dan mengamalkan agama secara proporsional dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Dalam konteks kebijakan nasional, moderasi beragama telah memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari agenda pembangunan kehidupan beragama dan kehidupan kebangsaan.¹⁴ Karena itu, lembaga pendidikan, termasuk madrasah, mempunyai posisi strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui proses pendidikan dan pengembangan kurikulum. Dan itu dikuatkan dengan adanya peraturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KMA No. 183 dan 184 tahun 2019 yang berisi tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab yang diperkuat dengan nilai-nilai moderasi beragama.

Moderasi beragama dalam konteks Indonesia dapat dilihat melalui empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal.¹⁵ Keempat indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam proses pendidikan melalui pengembangan materi, pembelajaran, budaya madrasah, keteladanan guru, kegiatan peserta didik, dan sistem evaluasi.

Dalam pendidikan Islam, nilai moderasi juga dapat dikembangkan melalui nilai-nilai *wasathiyah*, seperti tawassuṭ, i'tidāl, tasāmuḥ, syūrā, iṣlāḥ, qudwah, muwāṭanah, anti-kekerasan, dan ramah budaya.¹⁶ Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tujuan PAI karena memberikan orientasi agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu menerapkannya secara adil, seimbang, toleran, bertanggung jawab, dan sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Selain itu, prinsip moderasi beragama yang dikembangkan di Kementerian Agama untuk diterapkan di madrasah yaitu dengan adanya buku

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, hlm. 43.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2021).

panduan penerapan moderasi beragama yang didalamnya terdapat sepuluh prinsip yaitu : *taadub, tawasut, tawazun, tasamuh, tatawur wa ibtikar, musawah, muwatanah, musyawarah, qudwah dan i'tidal*.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa memasukkan nilai moderasi beragama ke dalam materi PAI saja belum cukup untuk menjamin terwujudnya perilaku moderat peserta didik. Nilai yang tercantum dalam dokumen kurikulum harus diterjemahkan ke dalam seluruh proses pengelolaan kurikulum. Dengan kata lain, moderasi beragama perlu hadir sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai evaluasi kurikulum.

Hal ini berkaitan dengan hakikat kurikulum yang tidak hanya dipahami sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai gagasan, rencana, proses implementasi, dan hasil yang dicapai peserta didik. Kurikulum sebagai rencana harus diterjemahkan menjadi kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, kemudian menghasilkan perubahan tertentu pada diri peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen kurikulum yang mampu menjembatani antara tujuan dan praktik pendidikan.

Manajemen kurikulum pada dasarnya merupakan proses pengelolaan kurikulum agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Rusman menjelaskan bahwa manajemen kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.¹⁷ Keempat fungsi tersebut menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah pengembangan dan implementasi kurikulum. Dalam konteks penelitian ini, perencanaan kurikulum PAI berbasis moderasi beragama mencakup analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penentuan kompetensi, pemilihan materi, pengembangan perangkat pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, serta perencanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang mengandung nilai moderasi beragama. Perencanaan yang baik harus mampu menerjemahkan nilai moderasi menjadi tujuan dan pengalaman belajar yang dapat

¹⁷ Rusman, *Manajemen Kurikulum, Edisi Kedua* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 3.

dicapai peserta didik. Oemar Hamalik menempatkan perencanaan sebagai proses sistematis dalam menentukan kesempatan belajar yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.¹⁸

Kedua, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian berkaitan dengan bagaimana sumber daya pendidikan disusun dan dikoordinasikan agar kurikulum dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam penelitian ini, pengorganisasian mencakup pembagian tugas dan kewenangan antara kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru PAI, wali kelas, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terkait. Pengorganisasian juga mencakup pengaturan program, jadwal, sumber belajar, kegiatan peserta didik, dan koordinasi antarpelaksana kurikulum. Dengan demikian, moderasi beragama tidak menjadi tanggung jawab individual guru PAI semata, tetapi menjadi tanggung jawab kelembagaan.

Ketiga, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan merupakan tahap aktualisasi dari rencana kurikulum ke dalam proses pendidikan. Pada tahap ini, kurikulum PAI berbasis moderasi beragama diwujudkan melalui proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik, keteladanan guru, penggunaan sumber belajar, serta kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nilai *tawassuṭ*, *tawāzun*, *i'tidāl*, *tasāmuh*, *muwāṭanah*, *qudwah*, musyawarah, anti-kekerasan, dan ramah budaya perlu tampak dalam pengalaman pendidikan peserta didik.

Pelaksanaan tersebut penting karena internalisasi nilai moderasi tidak hanya terjadi melalui proses kognitif, tetapi juga melalui pengalaman, pembiasaan, keteladanan, dan budaya lingkungan pendidikan. Dengan demikian, guru PAI tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai model atau *qudwah* bagi peserta didik. Lingkungan madrasah juga harus memberikan pengalaman nyata tentang toleransi, keadilan, musyawarah, penghargaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan kurikulum dan efektivitas implementasinya. Evaluasi

¹⁸ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 152.

kurikulum PAI berbasis moderasi beragama tidak cukup hanya mengukur kemampuan kognitif peserta didik, tetapi perlu memperhatikan perubahan sikap dan perilaku. Evaluasi dapat diarahkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menunjukkan sikap toleran, adil, seimbang, anti-kekerasan, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu menghargai budaya serta perbedaan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Keempat fungsi tersebut membentuk suatu siklus manajemen. Perencanaan menghasilkan program yang menjadi dasar pengorganisasian dan pelaksanaan. Hasil pelaksanaan kemudian dievaluasi, dan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kurikulum PAI berbasis moderasi beragama merupakan proses yang bersifat siklikal, sistematis, integratif, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan manajemen kurikulum PAI berbasis moderasi beragama tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum. Terdapat sejumlah komponen pendukung yang berpengaruh, antara lain sumber daya manusia, kepemimpinan madrasah, pembiayaan, sarana dan prasarana, kebijakan, serta budaya madrasah. Kepala madrasah memiliki peran penting dalam membangun visi dan kebijakan; wakil kepala madrasah bidang kurikulum berperan dalam koordinasi dan pengelolaan program; guru PAI berperan dalam menerjemahkan nilai moderasi ke dalam pembelajaran; sedangkan budaya madrasah menjadi lingkungan yang memungkinkan nilai tersebut dibiasakan.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai manajemen kurikulum PAI berbasis moderasi beragama menjadi penting karena terdapat kemungkinan kesenjangan antara kebijakan, dokumen kurikulum, implementasi, dan hasil pendidikan. Kebijakan moderasi beragama dapat saja telah tersedia, tetapi implementasinya belum tentu berjalan secara seragam. Demikian pula, nilai moderasi dapat tercantum dalam perangkat pembelajaran, tetapi belum tentu menjadi bagian dari budaya dan perilaku peserta didik.

Kajian terbaru mengenai transformasi pendidikan Islam dalam konteks Kurikulum Merdeka juga menunjukkan adanya *policy-practice gap*, yaitu

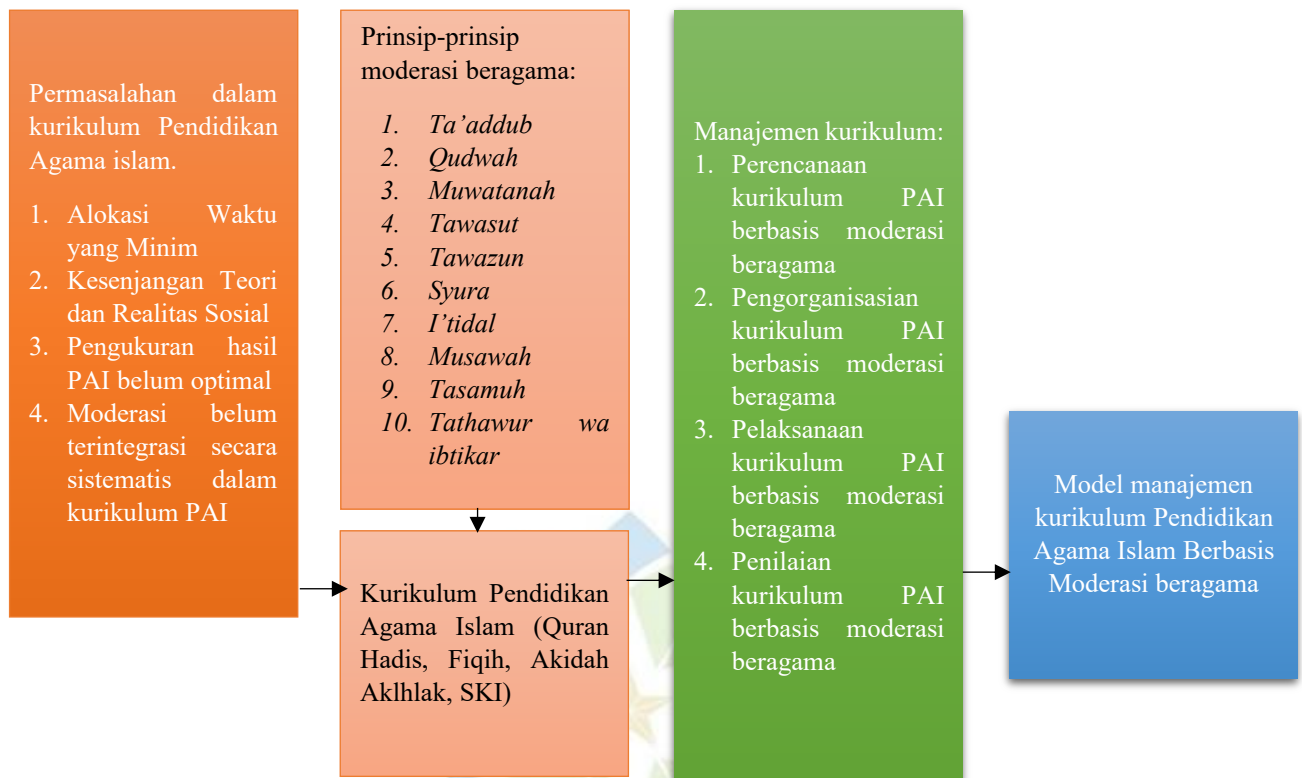
kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Hasil kajian tersebut menegaskan pentingnya kepemimpinan kelembagaan, pengembangan kapasitas guru, serta keselarasan antara desain kebijakan dengan kapasitas implementasi.¹⁹ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan moderasi beragama membutuhkan pendekatan manajerial, bukan hanya pendekatan pedagogis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibangun pemikiran bahwa moderasi beragama harus menjadi basis dalam keseluruhan manajemen kurikulum PAI. Moderasi tidak ditempatkan sebagai materi tambahan, melainkan menjadi nilai yang menjiwai tujuan, isi, proses, pengalaman belajar, budaya madrasah, dan evaluasi kurikulum.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan manajemen kurikulum PAI sebagai sistem utama yang terdiri atas empat fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, sedangkan moderasi beragama menjadi perspektif dan nilai yang mengarahkan pelaksanaan keempat fungsi tersebut. Keempat fungsi manajemen tersebut didukung oleh sumber daya manusia, kepemimpinan, pembiayaan, sarana-prasarana, kebijakan, dan budaya madrasah.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas Manajemen Kurikulum PAI Berbasis Moderasi Beragama akan diteliti dengan gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:

¹⁹ Nursani Awal Artha Nugraha, Agus Fakhruddin, Aldam Shaka Pradipta, Helmy Abdullah Helmy, dan Pitra Gosha Patriasya, "Grounding Islamic Education Transformation in Religious Moderation: Bridging the Policy-Practice Gap in Indonesia's Merdeka Curriculum," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (2026): 1–22.



Gambar 1.1 : kerangka berpikir penelitian

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha melakukan pencarian tentang penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang akan penulis teliti. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Perilaku Siswa SD, penulis Adi Saputra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Kurikulum PAI dan berbasis perilaku siswa di SD IT Al Bina Kota Pangkalpinang. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan partisipasi secara langsung dalam skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Manajemen Kurikulum PAI berbasis perilaku di SD IT Al Bina disana secara umum mencakup beberapa kegiatan utama dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan kurikulum PAI menggunakan acuan kurikulum 2013. Desain kurikulum PAI menekankan pada pengalaman pembelajaran. (2) kurikulum PAI dikelompokkan dalam beberapa bidang, yakni

akidah, akhlak, Qur'an dan hadis, fiqh, sejarah islam dan bahasa Arab. (3) pelaksanaan kurikulum PAI melibatkan peran kepala sekolah, guru, rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter, pembiasaan dan keteladanan, serta kegiatan ekstrakurikuler. (4) evaluasi pembelajaran yang digunakan yaitu penilaian proses dengan mengamati aktivitas siswa dan penilaian tugas (portofolio) serta memantau keberhasilan pembelajaran siswa di kelas.

Kedua, Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sma Negeri 1 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, penulis Murniati AR, Bahrin, Iskandar. Manajemen kurikulum menciptakan proses pembelajaran yang efektif agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik tujuan filosofis, kurikuler, institusional, maupun intruksional dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuan penelitian untuk mengetahui: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum pada SMA Negeri 1 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Metode penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah dan guru pada SMA Negeri 1 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan kurikulum yang dilaksanakan berdampak positif terhadap keefektifan pembelajaran, yang meliputi: penyusunan program tahunan, program semester, analisis mata pelajaran, penyusunan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran; (2) Pelaksanaan kurikulum berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tergambar adanya peningkatan disiplin guru dan siswa, berjalannya kegiatan ekstrakurikuler, adanya pembinaan siswa, baik melalui kegiatan intrakurikuler, maupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan pembelajaran; dan (3) Evaluasi kurikulum dilaksanakan, sehingga dapat diketahui tingkat kinerja guru dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah dan keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Ketiga, Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter Pada Sekolah Dasar Negeri Ujung Menteng 01 Pagi Jakarta, penulis Mohamad Arief dan Rusman. Degradasi moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada kalangan anak-anak

remaja (peserta didik) berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan. Tergambarkan dari begitu banyaknya permasalahan anak-anak remaja saat ini, yang tergambar baik secara langsung maupun dari berbagai media. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter diimplementasikan di sekolah. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu peneliti juga bertindak langsung sebagai key instrument untuk mendapatkan data yang jauh lebih mendalam dan bermakna saat di lapangan dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum berperan besar dalam keberhasilan sekolah mencapai visi, misi, tujuan, dan program-program sekolah yang dicanangkan. Salah satu faktor penunjang manajemen kurikulum tersebut adalah sikap dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai ujung tombak dalam manajemen kurikulum, kepala sekolah mengambil peran yang luar biasa sebagai inspirator, motivator, figur keteladanan, supervisi akademik, dan manajerial bagi segenap elemen yang ada di sekolah.

Keempat, Manajemen Kurikulum Dalam Peningkatan Proses Pembelajaran Pada SMK Negeri 1 Sabang, penulis Hanifah Djafar, Murniati, Sakdiah Ibrahim. Studi ini akan berbicara mengenai bagaimana manajemen kurikulum yang berbasis KTSP dapat berjalan di sekolah kejuruan yang memiliki kurikulum lebih kompleks dibandingkan sekolah menengah atas lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMKN I Sabang yang merupakan satu-satunya sekolah kejuruan di Sabang. Meskipun dapat berjalan, setelah melalui evaluasi ternyata pelaksanaan manajemen kurikulum KTSP mengalami beberapa kendala di antaranya ketiadaan forum MGMP untuk memperluas wawasan guru, kekurangan media dan alat praktik, serta terbatasnya lokasi prakerin dan kualifikasi guru yang belum mumpuni.

Kelima, Penerapan Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Dharmawangsa Meda, penulis Zamakhsyari, Suhendri, Dede Efrianti Lubis. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur: (1) perencanaan kurikulum

dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Dharmawangsa Medan; (2) pengorganisasian kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Dharmawangsa Medan; (3) pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Dharmawangsa Medan; (4) dan pengawasan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Dharmawangsa Medan. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa data deskripsi induktif serta teknik triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data. Analisa dilakukan dengan mengumpulkan semua hasil wawancara yang diperoleh dari informasi dan observasi yang peneliti lakukan dimana datanya masih bersifat khusus, kemudian menjadikan data tersebut disimpulkan menjadi bersifat umum.

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Peningkatan mutu pendidikan di SMA Dharmawangsa melalui perencanaan kurikulum telah mengadopsi pendekatan kolaboratif, yang berarti seluruh komponen sekolah dilibatkan dalam setiap fase perancangan kurikulum. (2) Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, pengorganisasian kurikulum di SMA Dharmawangsa telah diaplikasikan berdasarkan kaidah-kaidah pengembangan kurikulum, salah satunya adalah prinsip relevansi yang menitikberatkan pada keselarasan antara elemen-elemen kurikulum (tujuan, materi, evaluasi) dengan tuntutan masyarakat. (3) Implementasi kurikulum di SMA Dharmawangsa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan telah dijalankan secara optimal, khususnya dalam membangkitkan motivasi anggota tim agar memiliki keinginan kuat untuk mencapai sasaran pendidikan dan target sekolah. (4) Pengawasan terhadap kurikulum dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMA Dharmawangsa telah berhasil dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dari adanya ikhtiar terstruktur untuk menentukan tolok ukur pelaksanaan.

Keenam, Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran SD Solihuddin School Thailand, penulis Noerlitasari, Retno Triwoelandari, Muhammad Fahri. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti: (1). Manajemen kurikulum dan pembelajaran, (2). Perencanaan kurikulum di sekolah, (3). Pengorganisasian kurikulum di sekolah, (4). Pelaksanaan kurikulum di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumen. Selanjutnya data dianalisis, direduksi, diverifikasi kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Manajemen kurikulum dan pembelajaran di SD Solihuddin School diawali dengan tahap perencanaan, pengorganisasian kurikulum, dan pelaksanaan. Kedua, Perencanaan Kurikulum SD Solihuddin School sudah berjalan dengan terstruktur tetapi masih perlu dilakukan penyesuaian rencana yang telah dibuat agar dapat terencana semua yang telah ditetapkan pada rapat perencanaan yang dilaksanakan rutin pada awal semester. Ketiga, pengorganisasian kurikulum di SD Solihuddin School meliputi dua hal yaitu struktural dan akademik. Secara struktural sistem pengorganisasian kurikulum di bawah komando direktur (kepala sekolah).

Dalam konteks akademik, struktur kurikulum dikembangkan melalui organisasi yang mengategorikan mata pelajaran secara independen. Implementasi kurikulum di SD Solihuddin School dijabarkan menjadi dua strata: pelaksanaannya di tingkat sekolah dan di tingkat kelas. maka pelaksanaan pada tingkat kelas yang dikelola guru telah berhasil memenuhi standar dengan indikasi proses pembelajaran yang relevan dengan kemajuan zaman.

Ketujuh, Religious Moderation Implementation in Islamic Education: A Systematic Review, penulis Musyahid & Nur Kolis. Penelitian ini dengan menggunakan metodologi *Systematic Literature Review* (SLR) yang patuh pada protokol PRISMA, penelitian ini telah meninjau dan mensintesis informasi dari 16 studi terpilih yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun, yaitu dari 2019 hingga 2023. Hasil dari tinjauan literatur komprehensif ini memaparkan bahwa praktik moderasi beragama secara substansial diintegrasikan ke dalam berbagai aspek operasional dan kultural di lembaga pendidikan Islam. Aspek-aspek tersebut mencakup formulasi kurikulum, rancangan kegiatan pembelajaran, pembentukan atmosfer sekolah yang inklusif, serangkaian sesi orientasi bagi peserta didik yang baru bergabung, pelibatan dalam aktivitas yang memperkuat nilai kebangsaan, serta penekanan pada pentingnya guru sebagai model keteladanan. Lebih lanjut, efek positif dari implementasi ini teruji dalam hal kemampuannya menanamkan kepribadian yang moderat, mengasah kemampuan analitis dan kritis peserta didik,

sekaligus menjadi garda terdepan dalam menangkal pengaruh radikalisme di institusi pendidikan keagamaan Islam.

Kedelapan Strategy for Implementing Religious Moderation in Islamic Education Management, penulis M. Shalahuddin, Muhammad Miqdad Arromy, dengan jenis Kualitatif – Studi Kasus. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai metode pelaksanaan moderasi beragama dalam konteks pengelolaan institusi pendidikan Islam. Hasil dari investigasi tersebut mengindikasikan bahwa aktualisasi moderasi beragama diwujudkan melalui serangkaian tahapan strategis, meliputi perancangan silabus pembelajaran, pemupukan identitas budaya institusional, demonstrasi kepemimpinan yang patut dicontoh, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan kemitraan dengan komunitas eksternal, serta mekanisme peninjauan dan perbaikan program yang dilakukan secara berkala. Terdapat faktor-faktor yang berperan sebagai katalis positif, seperti adanya dedikasi penuh dari jajaran pimpinan dan lingkungan sekolah yang kondusif, namun di sisi lain, terdapat kendala yang muncul, termasuk disparitas pemahaman di kalangan pendidik dan keterbatasan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana yang tersedia.

Kesembilan, Strategy and Implementation of Religious Moderation in Islamic Education at UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis Suherman Priatna & Ahmad Fitriyadi Sari, jenis penelitian kualitatif deskriptif. Fokus utama dari investigasi ini adalah pada proses penerapan prinsip-prinsip moderasi beragama di institusi pendidikan tinggi Islam. Hasil investigasi menyimpulkan bahwa integrasi moderasi beragama dilakukan melalui serangkaian strategi, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan konten kurikulum, program pengembangan profesional berkelanjutan bagi dosen, kegiatan riset yang relevan, keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat, dan penanaman nilai-nilai akademik yang positif di lingkungan kampus. Lebih lanjut, proses implementasi ini difasilitasi secara signifikan oleh dukungan kebijakan internal universitas yang menetapkan moderasi beragama sebagai salah satu pilar dalam sistem manajemen pendidikan.

Kesepuluh, Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Religious Education Learning and Its Implications for the Behavior of Grade XI Students at SMA Negeri 1 Muara Enim. Penulis Zamrud Hatamudin, Dewi Purnama Sari, Rahmat Iswanto, Deri Wanto, jenis penelitian Kualitatif – Studi Kasus. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa pengintegrasian nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah dilakukan melalui kurikulum PAI, penanaman kebiasaan bersikap toleran, partisipasi dalam berbagai aktivitas keagamaan, serta melalui interaksi antarindividu dalam lingkup sekolah. Pelaksanaan strategi-strategi tersebut terbukti memberikan pengaruh yang konstruktif terhadap tingkah laku para peserta didik, yang termanifestasi dalam peningkatan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemauan untuk berkolaborasi di tengah keragaman.

Kesebelas, Implementation of Religious Moderation in Islamic Religious Education Learning at SMK N 1 Surakarta, penulis Inez Yuliane & Muhtoharrun Jinan, jenis penelitian Deskriptif (*Library Research*). Kajian ini menguraikan bagaimana moderasi beragama diimplementasikan dalam kerangka pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pembentukan pemahaman dan pengamalan nilai moderasi dilakukan secara sistematis melalui berbagai pendekatan, yaitu melalui aktivitas pembelajaran yang dirancang, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan pemahaman literasi keagamaan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan, dan keterlibatan peserta didik dalam berbagai proyek yang secara konsisten mengedepankan penanaman nilai toleransi dan pembentukan karakter inklusif.

Kedua belas, The Implementation of Islamic Religious Education Learning Methods Oriented Towards the Development of Religious Moderation Attitudes. Penulis Octavia Dwi Rahmadhani dan Juwita, penelitian ini *Library Research* Kualitatif Penelitian mengemukakan temuan bahwa implementasi PAI (PAI) yang berfokus pada moderasi beragama dapat diwujudkan melalui penerapan metode-metode yang mendorong partisipasi aktif peserta didik, refleksi mendalam, dialog yang konstruktif, serta pendekatan yang relevan dengan konteks kehidupan nyata. Dalam proses pembelajaran ini, peran pendidik sangat krusial; mereka bertindak

sebagai fasilitator yang bertugas menumbuhkembangkan kapasitas berpikir kritis siswa, menanamkan nilai toleransi, serta memupuk apresiasi terhadap segala bentuk keragaman yang ada.

Ketiga belas, The Paradigm of Religious Moderation in Building Moderate Islamic Education: Analysis of the Indonesian Ministry of Religion's Concept of Religious Moderation. Penulis Fahrul Rozi, Mutohharun Jinan, Iyas Ali Nurani. Jenis penelitian *Library research* / penelitian kepustakaan; dokumentasi dan analisis deskriptif Penelitian ini menganalisis kerangka kerja moderasi beragama yang diadopsi oleh Kementerian Agama, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pembentukan kurikulum PAI. Studi ini berhasil mengidentifikasi serangkaian nilai fundamental, yaitu *tawassut, i'tidal, tasamuh, al-shura, al-islah, al-qudwah, al-muwathanah, dan i'tiraf al-'urf*, yang berfungsi sebagai landasan esensial dalam upaya pengembangan pendidikan Islam yang berlandaskan prinsip moderasi.

Berdasarkan pada hasil penelusuran terhadap penelitian di atas, pada pokoknya semua penelitian tidak memiliki persamaan dengan topik penelitian yang hendak dilaksanakan penulis. Di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada sistem manajemen kurikulum dalam mengelola isi yang terfokus pada mata pelajaran PAI yang akan dipadukan dengan sentuhan baru yaitu dengan memberikan muatan moderasi beragama yang saat ini sedang digemborkan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Fenomena ini menjadikan alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut, dan penelitian ini difokuskan pada “Manajemen Kurikulum PAI Berbasis Moderasi Beragama” yang penting untuk diteliti.